

Media dan Demokrasi dalam Layar Televisi

Puspitasari*

Abstrak

Tulisan ini menyoroti bagaimana tayangan debat ILC di TVOne sesungguhnya mengonstruksi wacana mengenai Polri secara terbatas. Teori yang digunakan adalah Media dan Demokrasi oleh James Curran. Dengan menggunakan 2 tayangan ILC, pada kasus AA Gatot dan Dimas Kanjeng sebagai teks yang dijadikan titik tolak pembahasan dengan menggunakan analisis wacana kritis Sara Mills. Temuan menunjukkan bahwa media melalui program debat atau talkshow melakukan proses reduksi yang menggiring opini publik pada penyempitan makna fungsi Polri terbatas pada prosedural dan bukan pada fungsi strategis.

Kata kunci: Demokrasi, komodifikasi, subjek-objek, analisis wacana kritis Sara Mills

Pendahuluan

Curran (2011, p. 63) mengatakan bahwa unsur politik dan penggiringan opini khalayak dapat dan umum terjadi di sela-sela penyebaran informasi di media massa, khususnya pada program televisi yang bersifat menghibur. Media yang kini sarat dengan unsur entertainment atau hiburan perlu dilihat bukan hanya dalam fungsinya yang memberikan hiburan pada khalayak akan tetapi juga memiliki potensi untuk memengaruhi proses politik, baik secara eksplisit maupun implisit.

Lebih-lebih Curran kemudian menjelaskan bagaimana media dewasa ini semakin memiliki signifikansi karena menjadi produk yang

dikonsumsi oleh khalayak dari rentang usia yang relatif luas, termasuk di dalamnya adalah kelompok generasi muda. Kelompok masyarakat ini menggemari model hiburan baru yang di dalamnya mencakup debat demokrasi yang dikemas dalam bentuk hiburan yang bersifat menyenangkan (2011: 63).

Dalam konteks ini, sejumlah kasus menjadi contoh konkret bagaimana demokrasi masuk ke dalam ruang televisi dan menjadi tontonan yang bukan hanya menghibur masyarakat, melainkan sekaligus juga memengaruhi opini publik tentang kredibilitas dan integritas organisasi publik yang disinggung dalam televisi, dimana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi salah satu organisasi publik yang terkena dampaknya terkait dengan citra dan reputasinya. Apalagi sebagaimana terlihat dari data Transparency International pada tahun 2007 melalui survei

* Dr. Puspitasari, Dosen pada Program Pascasarjana Kajian Ketahanan Nasional dan Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, dan pada program S3 STIK-PTIK

barometer korupsi global yang menunjukkan bahwa kasus penyuapan mengalami peningkatan di kawasan Asia-Pasifik dan Eropa tenggara yang melibatkan polisi dan lembaga peradilan (Puspitasari, 2016, p. 115). Artinya bahwa isu penyuapan sendiri sudah mengganggu reputasi Polri, ditambah media menggiring opini khalayak yang justru menempatkan Polri semakin tersudutkan.

Beberapa kasus yang dapat menjadi instrumen untuk melihat praktik pewacanaan media yang menyudutkan Polri adalah pada kasus pembunuhan Wayan Mirna yang dituduhkan kepada Jessica, kasus narkoba yang melibatkan artis AA Gatot Brajamusti dan Reza Artamevia, kasus Dimas Kanjeng, serta yang dapat ditinggalkan adalah semaraknya pemberitaan terkait pilkada Jakarta 2017.

Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran media massa konvensional seperti televisi dan koran tidaklah cukup memberikan gambaran tentang proses pembentukan opini publik, mengingat kehadiran media sosial dewasa ini turut memberi warna yang semakin kuat memengaruhi opini publik terkait dengan Polri.

Teori Dan Metode

Teori yang digunakan sebagai basis dalam penulisan artikel ini adalah mengenai media dan demokrasi yang dikemukakan oleh James Curran yang secara cermat menjelaskan bagaimana media dalam iklim demokrasi liberal dewasa ini *jurstry* berpotensi mereduksi perputaran informasi publik. Sementara metode yang digunakan adalah analisis wacana Sara Mills. Teks yang diobservasi adalah tayangan Indonesia Lawyer's Club episode AA Gatot Brajamusti pada 13 September 2016 dan tayangan Indonesia Lawyer's Club episode Dimas Kanjeng pada 4 Oktober 2016.

Metode analisis yang digunakan adalah metode Analisis Wacana Kritis dari Sara

Mills yang menjelaskan bagaimana teks bias dalam menampilkan suatu isu. Ada pihak yang cenderung ditampilkan dalam teks sebagai pihak yang salah, marjinal dibandingkan dengan pihak lainnya. Hal tersebut tentu melibatkan strategi wacana tertentu, sehingga ketika ditampilkan dalam teks, Polri dalam hal ini akan tergambarkan secara marjinal.

Sara Mills lebih melihat pada bagaimana posisi-posisi aktor ditampilkan dalam teks. Posisi-posisi ini dalam arti siapa yang menjadi subjek penceritaan dan siapa yang menjadi objek penceritaan akan menentukan bagaimana struktur teks dan bagaimana makna diperlakukan dalam teks secara keseluruhan. Sara Mills juga memusatkan perhatian kepada bagaimana pembaca dan penulis ditampilkan dalam teks, serta bagaimana pembaca mengidentifikasi dan menempatkan dirinya dalam penceritaan teks. Hal tersebut memengaruhi bagaimana teks tersebut kemudian dipahami dan bagaimana aktor-aktor sosial tersebut ditempatkan. Sehingga pada akhirnya, cara penceritaan dan posisi-posisi yang ditampilkan dan ditempatkan dalam teks ini membuat satu pihak menjadi legitimate dan pihak lainnya menjadi illegitimate.

Posisi sebagai subjek atau objek dalam representasi ini mengandung muatan ideologis tertentu. Pertama, posisi ini menunjukkan dalam batas tertentu sudut pandang penceritaan. Sebuah peristiwa dan gambaran aktor-aktornya dijelaskan dalam sudut pandang sang subjek. Pemberitaan yang dibentuk di dalam pemikiran khalayak adalah suara tunggal sang subjek. Dengan demikian, khalayak tergantung sepenuhnya kepada narator yang tak hanya menampilkan dirinya sendiri, tetapi juga sebagai juru warta kebenaran. Kedua, sebagai subjek representasi, sang subjek memiliki otoritas penuh dalam mengabsahkan penyampaian peristiwa tersebut kepada pembaca. Ia memiliki keleluasaan menceritakan peristiwa dan menafsirkan berbagai tindakan yang

membangun peristiwa tersebut, kemudian hasil penafsirannya digunakan untuk membangun pemaknaan yang ingin ia sampaikan kepada khalayak. Ketiga, karena proses pendefinisian itu bersifat subjektif, maka ada pendefinisian bersifat sepihak peristiwa atau kelompok-kelompok lain. Tak hanya mendefinisikan dirinya sendiri, tetapi ia juga mendefinisikan pihak lain dalam perspektifnya sendiri.

Teknik keabsahan data adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data yang absah yaitu dengan teknik triangulasi baik triangulasi sumber maupun triangulasi data.

Temuan Data Tektual

Dalam tayangan Indonesia Lawyer's Club episode AA Gatot pada 13 September 2016 dibuka dengan informasi dari kepolisian bahwa kasus ini adalah kasus berat, dan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Kapolres Mataram. Tayangan ini diwarnai dengan kehadiran sejumlah artis dan representasi Parfi seperti Renzy Milano, kakak dari Elma Theana, Pong Harjatmo, Ki Kusumo, Aditya, dan juga beberapa pengacara seperti Elza Syarif, Nyoman Adi Perry, Ramdan Alamsyah, pun representasi Granat, Henry Yosodiningrat, selain beberapa orang lainnya, termasuk ketua RW di kawasan Pondok Pinang. Pembahasan difokuskan pada gambaran sosok AA Gatot dan Reza, pembahasan kasus dan juga keanehan-keanehan yang muncul, termasuk kesaksian dari seorang saksi yang disamarkan identitasnya, CT.

Selain berisi pendapat-pendapat dari para narasumber, tayangan ini juga diisi dengan cuplikan penggerebekan dan razia yang dilakukan di hotel di Mataram, serta di padepokan dan rumah tinggal kedua tersangka. Selain itu muncul pula cuplikan tayangan yang menampilkan sosok Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Pada tayangan yang berikutnya, terkait dengan berita mengenai Dimas Kanjeng dalam kasus penipuan dan pencucian uang yang mengaitkan seorang intelektual yaitu Marwah Daud Ibrahim. Dalam episode Dimas Kanjeng, khalayak sama halnya dengan episode AA Gatot juga disuguhi dengan beragam figur yang dikenal luas oleh publik. Perbedaannya terletak pada ranah para narasumber dalam kasus ini adalah ranah akademik yang bersentuhan dengan ranah agama, maka tidak mengherankan yang menjadi narasumber adalah para cendekia seperti Prof Dr. Azyumardi Azra, Prof. Mahfud MD, hingga ketua MUI Jawa Timur dan mantan Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi. Pada sisi lain yang menjadi narasumber adalah Prof Dr. Marwah Daud Ibrahim yang merupakan ketua Yayasan dari lembaga Dimas Kanjeng. Sementara kepolisian diwakili oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol RP Argo Yuwono.

Dari segi konten, ada beberapa kemiripan gagasan yang disajikan dalam dua tayangan dalam dua kasus yang berbeda ini, pertama menempatkan kepolisian sebagai representasi penegak hukum dan diposisikan sebagai pihak yang memberikan penjelasan secara kronologis mengenai proses penangkapan yang dilakukan dan sumber informasi yang mereka peroleh sebagai dasar dari penangkapan. Kedua, meletakkan peristiwa ini dalam perspektif nilai-nilai keagamaan. Dan kemiripan dalam aspek kedua tersebut menggiring pada kesamaan ketiga yaitu meletakkan peristiwa ini ke dalam konteks keberagaman yang diberi penilaian sebagai sesat. Dan terakhir, tayangan ini menempatkan tiga pihak, pertama pihak yang menjadi korban, kedua pihak yang mewakili pihak yang menjadi tersangka dalam kasus ini, dan ketiga adalah pihak di luar keduanya, yang diasumsikan sebagai instrumen untuk memperkaya pemahaman khalayak tentang kasus yang dibahas.

Analisis Media Dalam Perspektif Pasar

Dari perspektif Curran (2001: 121-154) yang menegaskan bahwa media semakin masuk ke dalam bias mekanisme pasar, kedua kasus di atas tersebut dapat menjadi bukti yang selaras dengan pernyataan Curran. Hal tersebut terlihat dari bagaimana Indonesia Lawyer's Club mengemas kasus tersebut dalam proyek komodifikasi. Penggunaan para narasumber yang dikenal luas oleh khalayak yang menonton menjadi salah satu indikasi bahwa tayangan ini dikemas dengan mengikuti selera pasar. Kalimat penutup yang disampaikan oleh pembawa acara Karni Ilyas, cenderung pada upaya menggiring publik pada nilai-nilai keagamaan, terutama nampak pada episode Dimas Kanjeng yang mengutip surat An-Nisa.

Kecenderungan lain yang nampak terkait bias pasar adalah penggunaan beberapa atribut seperti topeng yang digunakan pada narasumber yang disembunyikan identitasnya pada episode Aa Gatot dimana narasumber tersebut sekalipun menggunakan topeng, berkat dandanan yang digunakan membangun kesan cantiknya si narasumber tersebut. Hal lain dalam episode Dimas Kanjeng, dimana pangacara dari Dimas Kanjeng menggunakan atribut kerudung berwarna hitam, untuk menyeimbangkan tampilan dari dua narasumber yang merupakan istri dari keluarga korban Dimas Kanjeng.

Dalam dua episode tersebut nampak jelas bagaimana Polri sebagai penegak hukum ditempatkan dalam skema pemaparan. Wajah demokrasi ditampilkan dengan memunculkan seluruh narasumber yang terlihat memiliki relevansi, termasuk diantaranya adalah dari kepolisian. Akan tetapi, jika dilihat dari konteks keseluruhan tayangan tersebut, Polri hanya menjadi bagian kecil dari totalitas program. Ditilik dari segi konten, argumen yang dapat diajukan adalah terkait dengan unsur nilai jual. Tentu, dengan memberikan ruang bagi

munculnya banyak wacana dari sejumlah narasumber, diasumsikan akan meningkatkan penerimaan khalayak, yang berkorelasi dengan peningkatan *rating* dan *audience share*. Meningkatnya *rating* dan *audience share* menjadi elemen yang dapat mendongkrak nilai jual dari program ILC itu sendiri dan pendapatan dari stasiun televisi tersebut.

Terkait dengan isi tayangan, nampak bahwa media dalam konteks liberalisasi tidak memunculkan sikap independensi untuk melayani kepentingan publik, melainkan lebih untuk keuntungan perusahaan. Liberalisme menciptakan kondisi media yang pada akhirnya mereduksi perputaran informasi publik, dan meningkatkan jumlah masyarakat yang belum melek media. Dengan semakin semakin besarnya porsi penempatan isi hiburan dan meminggirkan liputan terkait dengan public affairs, atau program yang mencerdaskan, pada gilirannya akan mengurangi bobot demokrasi karena khalayak dalam hal ini pelan-pelan diajak bersetuju dengan wacana yang disajikan dan mencernanya sebagai bagian dari penerimaan mutlak. Di sini, demokrasi direduksi hanya sekedar menjadi instrumen yang digunakan dengan menampilkan kesan beragam warna, akan tetapi sudah melalui proses reduksi makna yang dilakukan sehingga partisipasi publik dalam hal mereaksi secara berbeda dan membuka ruang perbedaan pendapat dihilangkan.

Jika ditilik dari segi demokrasi yang menjadi seolah-olah demokrasi, sebuah pertanyaan baru menjadi muncul, jika demikian apakah peran Polri dalam media? Apakah Polri hanya berperan membangun wacana terbatas pada narasi tentang kronologi peristiwa, atau justru sebaliknya Polri ditantang masuk lebih dalam lagi yaitu memasuki ruang publik dengan wacana yang lebih menempatkan Polri membangun dan mengembangkan wacana yang lebih luas lagi. Apa artinya? Seperti apa manifestasi dari memasukkan wacana yang lebih luas?

Jika sebelumnya Polri menempatkan (dan juga ditempatkan oleh media) sebagai organisasi publik yang dibatasi wacananya hanya semata sebagai pihak yang menyampaikan kronologi. Maka Polri perlu merumuskan ulang panggilannya dalam konteks masyarakat yang mulai semakin mudah digiring opininya oleh media dan pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang tidak sedikit pada pelemahan pembentukan reputasi positif dari Polri di mata publik.

Sebagaimana dijelaskan oleh Dan Nimmo (2010, p. 188) bahwa media massa sesungguhnya memiliki peran untuk membantu menyusun agenda pokok masalah untuk perdebatan publik, menetapkan konteks untuk penilaian rakyat tentang kejadian, mengubah kejadian menjadi peristiwa, memengaruhi pengharapan rakyat tentang bagaimana akhirnya peristiwa itu.

Sementara Harold D. Lasswell menyebutkan bahwa media massa memiliki beberapa fungsi diantaranya yakni pengawasan, mengaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada di tengah masyarakat. Terkait dengan fungsi yang pertama bahwa media menjadi pengamat, dan mengawasi lingkungan dan berdasarkan pengamatan tersebut menyampaikan informasi pada publik yang dikaitkan dengan pandangan Nimmo berarti bahwa media dalam menyampaikan informasi sesungguhnya menyusun agenda pokok yang menggiring opini publik, pada titik ini kita diajak mulai memperhatikan secara cermat bagaimana media membangun opini publik tentang fungsi dan peranan Polri.

Dalam konteks ini kita juga melihat bahwa tayangan sebuah kasus dalam ILC dikemas sedemikian rupa dalam bentuk yang menghibur, tentu saja dapat dengan mudah masuk ke dalam benak pemikiran khalayak. Melalui strategi mengemas produk inilah, sebuah wacana menjadi sangat powerful dalam memengaruhi perilaku dan pemikiran masyarakat.

Strategi Mengemas Wacana

Livingstone dan Lunt menjelaskan dengan sangat baik mengenai hal-hal yang menjadi kekuatan dalam sebuah program debat atau talkshow di televisi. Kekuatan pertama adalah pembawa acara. Dalam sebuah program debat, pembawa acara sesungguhnya memegang peranan yang sangat vital, karena ia tidak hanya bertugas menggali informasi dari narasumber, tetapi juga sekaligus memfasilitasi dan mengatur jalannya diskusi. Peran pembawa acara di sini tidaklah artificial, melainkan menjadi sentral dalam mengajukan pertanyaan untuk dapat menjawab keingintahuan khalayak akan suatu kasus atau isu tertentu. Selain itu, pembawa acara juga menentukan bagaimana dinamika suasana yang terjadi di dalam acara *talk show*.

Hal kedua yang menjadi kekuatan dalam program debat di televisi adalah pemilihan topik. Pilihan topik haruslah didasari oleh pertimbangan bahwa secara umum topik-topik yang kontroversial merupakan topik yang diminati khalayak. Lebih lanjut bahwa Livingstone dan Lunt (2001, p. 82) menggarisbawahi bahwa kontroversi sesungguhnya merupakan semacam cara untuk meraih minat khalayak karena kontroversi pada dasarnya dapat mengaduk-aduk emosi dan kesenangan khalayak lebih dari soal apakah argumennya baik atau tidak.

Hal ketiga dan terakhir adalah narasumber. Program debat atau talk show umumnya akan mengundang narasumber yang memiliki keahlian dan juga berhubungan dengan topik yang dibahas. Narasumber yang dihadirkan dalam acara talk show dapat merupakan seorang ahli di bidang tertentu atau orang awam yang memiliki pengetahuan dan terlibat langsung dengan topik yang dibahas di dalam sebuah topik talk show.

Jan Wieten, Graham Murdock, dan Peter Dahlgren (2000, p. 203) mengklasifikasi program talk show menjadi tiga sub-genre, yakni political

talk show, celebrity talk show, dan participatory talk show. Berdasarkan pembagian sub-genre tersebut, maka program

Indonesia Lawyer's Club yang ditayangkan oleh TVOne sesungguhnya masuk dalam kategori political talk show, karena program tersebut menjadikan pembahasan dan wawancara dengan sejumlah narasumber dan memasukkannya dalam ranah publik dan politis karena melibatkan organisasi-organisasi politik yang ada di negeri ini.

Dalam menyajikan informasi, media didorong oleh spirit kebebasan media dalam konteks era globalisasi yang menuntut para pekerjanya untuk saling bersaing antar satu dengan lainnya dalam rangka menyampaikan pesan atau makna yang diinginkan. Maka tidak jarang dewasa ini media massa memiliki nilai yang berbeda, misalnya nilai-nilai politik. Fungsi media kini tidak hanya sekadar menghibur, tetapi juga mengandung unsur politik, yang kemudian dapat menggiring opini khalayak di sela-sela penyebaran informasi di media massa yang bersifat menghibur, baik secara eksplisit, maupun implisit (Curran, 2001, p. 64- 68).

Curran juga menjelaskan bahwa bagaimana hiburan mendukung proses demokrasi dengan berkontribusi terhadap formasi, pemeliharaan, dan terkadang pada reformasi identitas sosial. Minat seseorang, dalam hal ini mengenai politik, tergantung tak hanya pada objektif mereka, tetapi juga pada di kelompok mana ia mengidentifikasi diri mereka sendiri dan dengan siapa mereka merasa terancam. Konsumsi media kemudian memengaruhi pengertian khalayaknya mengenai diri mereka, pihak mana yang seharusnya mereka pilih, dan dengan siapa mereka bertentangan. Curran juga menyatakan bahwa khalayak dapat tergabung dalam sebuah debat demokrasi melalui sebuah hiburan yang bersifat menyenangkan.

Hal ketiga yang dijelaskan oleh Curran

adalah bahwa hiburan dapat membentuk pemikiran khalayaknya mengenai sebuah realitas. Hiburan dalam hal ini berkemampuan untuk menampilkan gambaran masyarakat dan membantu kita untuk menginterpretasinya (2001, p. 69).

Selain itu menurut Curran (2001, p. 72) media juga membuat dialog mengenai norma-norma publik, yang juga merupakan peraturan, perjanjian, dan ekspektasi, yang mengarahkan perilaku individu dan interaksi sosialnya. Hal ini juga mencakup pemahaman akan tindakan apa yang sepantasnya dilakukan dan apa yang tidak, juga perilaku apa yang dapat diterima dan apa yang tidak. Dengan demikian nampak bahwa hiburan dalam media dapat menginformasikan sebuah debat tentang nilai, identitas, pemahaman akan masyarakat, beserta norma-norma yang penting dalam proses demokrasi (Curran, 2001: 82).

Apa yang dijelaskan oleh Curran menjelaskan tentang dinamika penggiringan opini publik pada terbatasnya peran dan fungsi penegak hukum yaitu sebagai pemberi penjelasan mengenai kronologi peristiwa. Polri dalam hal ini diwacanakan oleh ILC terkait dengan identitas penegak hukum yang menyuarakan dirinya sendiri sebagai aparat berbasis kronologi. Sama halnya dengan intelektual yang diwacanakan terbatas sebagai ahli yang dibatasi juga wacananya dengan merujuk pada identitas sebagai ahli dalam bidang tertentu yang dianggap relevan.

Media mengutip Kraus, Sidney, Davis, dan Denis (Hamad, 2004, p. 37) menyatakan bahwa media adalah saluran komunikasi politik yang efektif. Media massa dinilai memiliki kekuatan yang besar dalam menyebarluaskan pesan-pesan politik, melakukan sosialisasi politik, dan membentuk opini politik. Bahkan tidak hanya itu saja, Comstock misalnya mengatakan bahwa pembentukan citra seseorang atau organisasi dapat dibentuk oleh media.

Dengan demikian Comstock sesungguhnya semakin menegaskan bahwa organisasi, dalam hal ini Polri dibentuk citranya oleh media, secara simultan dan konsisten, sehingga identitas dan citra organisasi Polri menjadi semakin terbentuk sebagaimana dikonstruksi oleh media.

Posisi Subjek-Objek Dalam Wacana ILC

Dalam konteks ILC, jelas bahwa yang menjadi subjek adalah ILC, akan tetapi sesungguhnya ILC di sini lebih merupakan representasi Karni Ilyas, seorang wartawan senior, yang dalam hal ini mewakili kepentingan media. Sementara yang menjadi Objek adalah kasus AA Gatot dan Dimas Kanjeng.

Dalam konteks subjek-objek, nampak bahwa subjek yaitu ILC memegang peranan yang dominan dalam memilih topik, angle, narasumber dan termasuk dalam mengarahkan diskusi. Dinamika dan alur diskusi nampak kental diatur oleh pembawa acara, dalam hal ini Karni Ilyas. Dan dalam skema produksi, ILC dan Karni Ilyas sebagai subjek memiliki otoritas dalam mengonstruksi wacana. Konstruksi wacana bukan hanya terkait siapa yang bersalah, apa kesalahannya, seberapa berat kesalahannya, melainkan juga termasuk pada siapa yang akan membantu membangun konstruksi wacana tersebut, apa peran masing-masing narasumber dalam konstruksi wacana.

Dengan demikian hal itu berarti bahwa segenap narasumber sudah diatur sedemikian rupa peran dan fungsi dalam membangun wacana yang sesungguhnya sudah didesain oleh produser program. Dalam konteks ini, Polri menjadi bagian kecil dalam skema produksi, yang sudah dikonstruksi peranannya dalam totalitas wacana yang hendak dibangun oleh ILC. Polri diberi kesempatan untuk membuka ruang wacana, melalui wacana tentang kronologi peristiwa. Tidak lebih dari itu. Kalaupun ada segi lain yang dikonstruksi oleh Polri adalah pada

bagian mengonfirmasi pernyataan narasumber lain terkait dengan kronologi peristiwa.

Dua tayangan yang menggambarkan dua kasus berbeda menunjukkan proses pewacanaan yang memiliki kemiripan dari segi urutan peristiwa, yaitu pada bagian pembuka, Wacana yang disampaikanpun memiliki kemiripan dalam hal memberikan kronologi.

Dua tayangan ini tanpa disadari telah menggiring opini khalayak pada gambaran yang kategoris pada polisi, pihak yang menangkap kriminal atau penjahat. Wacana lain yang dikonstruksi dan didistribusikan pada khalayak adalah bahwa polisi terbatas pada peran untuk memberikan kronologi, atau peran prosedural, dan bukan peran strategis dalam fungsi penegakan hukum.

Di sini terlihat apa yang dijelaskan oleh Sara Mills bahwa tidak setiap aktor, diantaranya representasi Polri, dalam ruang debat tersebut memiliki kesempatan untuk menampilkan dirinya sendiri atau gagasan sendiri, melainkan gagasan yang didorong pihak Subjek untuk ditampilkan. Fungsi strategis Polri direduksi melalui proses pewacanaan yang sistematis dalam ranah debat publik ILC, sehingga wacana yang melekat dalam benak kesadaran masyarakat umum sebagai khalayak ILC menjadi terbatas pada aspek prosedural dan bukan strategis sebagaimana yang selayaknya mulai diwujudkan oleh Polri dalam ruang publik yang berdaulat.

Referensi:

Curran, James (2000). *Media and Democracy*. London: Sage Publications

Hamad, Ibnu. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit

Livingstone, Sonia dan Peter Kenneth Lunt (1994). *Talk on Television: Audience Participation and Public Debate*. London & New York: Routledge

Mills, Sara (2000). *Discourse*. London & New York: Routledge

Puspitasari (2016). *Komunikasi Krisis: Strategi Mengelola dan Memenangkan Citra di Mata Publik*. Jakarta: Libri

Wieten, Jan, Graham Murdock, & Peter Dahlgren. 2000. *Television Across Europe: A Comparative Introduction*. London: SAGE Publication Ltd.

